



10 Raperda Masuk Prolegda 2011

JOGIA - Setelah kehilangan kesempatan membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) pada triwulan pertama lalu, DPRD Kota Jogja akhirnya mengesahkan program legislasi daerah (Prolegda) 2011. Dalam rapat paripurna di kantor dewan kemarin (18/4), para wakil rakyat sepakat mengesahkan 10 raperda menjadi Prolegda 2011.

"Setelah sempat alot terjadi perdebatan antara 10 raperda dengan 12 raperda, akhirnya hari ini bisa disahkan," ujar Ketua Badan

Legislasi (Banleg) DPRD Kota Jogja Agung Atmojo ditemui di sela rapat paripurna kemarin.

Dia menjelaskan, perdebatan jumlah raperda tersebut menjadi kendala tersendiri pengesahan Prolegda. Bahkan, ini yang sempat menunda badan musyawarah (Banmus) menjadwalkan agenda Rapur Prolegda.

"Sebenarnya kalau semua bahan, termasuk dua usulan dari Fraksi PDIP tentang Perda Pengelolaan Parkir serta BUMD-nya siap, dan Perda Kekerasan Bias Gender

dan Anak, semuanya sudah bisa disahkan," kata politikus dari Partai Demokrat ini.

Berdasarkan keputusan dalam paripurna kemarin, dewan menyepakati bakal menyelesaikan 10 Raperda di tahun 2011 ini (*selengkapnya lihat grafis*). Dari 10 raperda tersebut, tiga draf Raperda yakni tentang UMKM, PBB, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah siap. Raperda yang seharusnya dibahas di triwulan pertama ini pun akhirnya harus molor terbahas di triwulan kedua.

► *Baca 10 Raperda... Hal 14*

10 RAPERDA...

Sambungan dari hal 13

Alhasil, di triwulan kedua yakni April sampai Juni nanti, dewan harus kerja keras menyelesaikan enam raperda. "Untuk tiga raperda yang ditarget dibahas triwulan pertama, tinggal dipansuskan," kata Agung menanggapi molornya penetapan Prolegda 2011.

Selain berdampak pada jumlah raperda yang dibahas, penetapan yang molor juga mengakibatkan dua raperda usulan Fraksi PDIP harus me-

lalui pembahasan di Banleg. Kedua raperda tersebut adalah tentang Pengelolaan Parkir dan Kekerasan Bias Gender dan Anak. Setelah itu, baru bakal dipansuskan sebagai raperda di luar prolegda.

Nasib tak masuk Prolegda bukan hanya menimpa perda usulan dari fraksi terbesar di DPRD Kota Jogja tersebut. Raperda inisiatif eksekutif tentang Penyertaan Modal yang berhubungan dengan operasional XT Square juga bernasib sama.

Tentang masalah ini, Agung menjelaskan, pihaknya tak

bisa memasukkan Raperda susulan menjadi Prolegda. Sebab, internal Banleg telah menyepakati untuk memprioritaskan raperda yang masuk di Desember 2010 lalu. "Semua raperda yang belum siap dan tak masuk usulan di awal dahulu, kami masukkan dalam raperda di luar prolegda," terangnya.

Sebelumnya, eksekutif ngotot agar Raperda Penyertaan Modal untuk BUMD PD Jogjatama Vishesa dapat masuk Prolegda 2011. Ini mereka lakukan mengingat Juli nanti, proyek pasar kuliner tersebut

bakal diresmikan.

"Target operasional tidak akan berubah. Kami tetap berusaha mengejar tata kala yang ada," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aman Yurriadjaya, sebelumnya.

Aman saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD Kota Jogja menegaskan, pihaknya tetap akan mengejar target *launching* XT Square sesuai jadwal. Meskipun, operasional perusahaan yang mengelola terancam molor karena belum ada payung hukum penyertaan modal perusahaan berplat merah itu. (eri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			

Yogyakarta, 26 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005